ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana praktek implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, secara khusus di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan Indonesia pada umumnya, serta bagaimana kebijakan *Tax Manesty* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah.*

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode wawancara dan dokumenter. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian seara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara Undang-Undang dengan pelaksanaan perogram. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Maṣlaḥah Mursalah.*

Hasil penelitian menjelaskan, hukum implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). *Tax Amnesty* termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. *Tax Amnesty* merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Kemaslahatan *Tax Amnesty* ini tidak hanya bermanfaat untuk segelintir orang, tetapi untuk negara dan masyarakat. Berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* juga membantu pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Penulis mengharapkan agar pemerintah yang berwenang dalam kebijakan *Tax Amnesty* ini benar-benar menjalankan tugas sesuai amanat UU nomor 11 tahun 2016 dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat lebih aktif berpartisipasi dan mengawal jalannya kebijakan ini, dengan tujuan agar bisa mengurangi penyelewengan. Sehingga, dengan kerja sama seluruh elemen – mulai dari perintah hingga masyarakat bawah – *Tax Amnesty* ini diharapkan bisa membawa banyak *maṣlaḥah* bagi semua pihak dan menunjang pembangunan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id